

Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Monita Oktavia & Prayetno*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: Desember 2018; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018

*E-mail: eno.pray@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kondisi pembangunan infrastruktur di desa Rianiate dibawah kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan infrastruktur sebuah desa tergantung pada peran kepala desa dalam membina dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kepala desa harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai motivator, fasilitator, menerapkan prinsip transparansi, disiplin, adil dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pembangunan desa. Pembangunan di Desa Rianiate sudah cukup sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Kepemimpinan kepala desa secara umum sudah baik meskipun masih kurang maksimal. Kepemimpinan tersebut sudah melekat dalam diri kepala desa Rianiate. Pada sisi lain, temuan dilapangan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan terlibat dengan kecenderungan mementingkan urusan pribadi.

Kata kunci: *Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Desa*

Abstract

This article aims to present the condition of infrastructure development in Rianiate village under the leadership of the village head in developing village infrastructure. One indicator of the success of infrastructure development in a village depends on the role of the village head in fostering and involving community participation. The village head must be able to carry out his function as a motivator, facilitator, apply the principles of transparency, discipline, fairness and responsibility in carrying out village development tasks. Development in Desa Rianiate is already quite good, although there are still some shortcomings. The leadership of the village head in general is good even though it is still not optimal. The leadership was inherent in the village head of Rianiate. On the other hand, findings in the field are still found by some people who are reluctant to get involved with the tendency to prioritize personal matters.

Keywords: *Village Chief Leadership, Community Participation, Village Infrastructure Development*

How to Cite: Oktavia, M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 81-92.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan menurut UU No. 6 Tahun 2014 diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dalam pembangunan. Hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa atau tingkat kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Peran aktif dari pemerintah sebagai penyedia dana pembangunan tidak dalam porsi keseluruhan karena perannya sebagai penyedia terbatas, dalam hal ini pemerintah hanya



<http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/iehss>



mahesainstitut@gmail.com

81



memberikan stimulus yang bersifat rangsangan untuk memancing swadaya masyarakat. Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi alam harus di gali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dimana desa tidak lagi sebagai bawahan daerah tetapi sebaliknya desa dan masyarakatnya berhak atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembanguana Infrastruktur desa. Desa sebagai unit pemerintah terkecil di dalam kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam satu masyarakat biasanya diarahkan pada pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan kolektif masyarakat yang bersangkutan, baik peningkatan kapasitas akibat proses pemberdayaan masyarakat sendiri maupun hasil material atau kesejahteraan fisik” (Soetomo 2010:56). Dalam meningkatkan efektivitasnya, pemerintah idealnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sehingga akhirnya dapat memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjalankan program pembinaan masyarakat desa sebagai proses yang berlangsung di desa dan tak terpisah dari pembangunan nasional.

Peran kepala desa sangat penting dalam keberhasilan suatu daerah, dalam pembangunan di wilayahnya, kepala desa merupakan perencana, pengawas, pelopor dan dinamisator. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan, menumbuhkan serta mengembangkan swadaya pembangunan yang maksimal bagi infrastruktur desa. Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap desa mesti mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di desa mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik.

Kepala desa selaku pejabat pemerintah idealnya selalu dapat menampilkan sikap dan perilaku yang mencerminkan citra kepemimpinan, baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, dengan prinsip utama memberdayakan masyarakat itu sendiri, bukan menegakkan kekuasaan pemerintahan yang bersifat represif otoritarian. Dengan prinsip itu, dominasi peran birokrasi dapat mengalami pergeseran, diganti dengan menguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat. Hal ini didasarkan pada paham bahwa pemilik otonomi daerah bukan pemerintah, yang menikmati kekuasaan, kewenangan dan kekayaan, melainkan masyarakat lokal. Dari penjelasan di atas, bahwa pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa di era otonomi daerah. Responsivitas dan akuntabilitas pelayanan publik menjadi agenda yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pejabat pada tingkat ini, selain dalam upaya menjalankan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pentingnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Harus terjadi kesesuaian antara kepentingan aparat sebagai penyedia pelayanan publik dan aspirasi masyarakat, tanpa tercampuri kepentingan, sikap dan perilaku diskriminatif pejabat itu sendiri. Implikasinya adalah jika masyarakat merasa nyaman dan tenang dalam berurusan dengan penyedia pelayanan dan berpartisipasi dalam pemerintahan, pembangunan maupun

kemasyarakatan, maka kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa ini secara keseluruhan akan menjadi baik dan memuaskan.

Kepala Desa Raniate selaku pemimpin desa dalam menangani pembangunan desa jika diperhatikan dan didengar melalui perkataan sementara oleh masyarakat tanggap dengan kondisi desa, misalnya melalui penelitian awal peneliti mendengar bahwa ada beberapa tindakan dari kepala desa dalam memperhatikan bahkan sampai memperbaiki kondisi rumah masyarakat yang tidak layak pakai bahkan kepala desa juga beberapa kali mendata rumah yang tidak memiliki kamar mandi dirumah warga yang masih bisa dijangkau perhatinnya melalui pegawai desa yang diutus. Diantara beberapa desa yang ada dikecamatan Pangururan desa Raniate termasuk desa yang paling luas, desa yang dihuni sekitar 1600 jiwa (\pm 665 KK). Menurut keterangan beberapa warga dikarenakan kondisi pemukiman didesa Raniate memiliki titik kelompok rumah atau lebih dikenal susunan perumahan warga yang tidak merata misalkan pada titik A ditemukan ada sekitar 20 rumah kira-kira sekitar kurang lebih 150 meter, kondisi wilayah desa Raniate dengan kondisi pemukiman yang menyebar dikarenakan kondisi ketinggian tanah tidak merata sehingga masyarakat berinisiatif mendirikan rumah dibagian-bagian yang cukup rata yang bisa dianggap dapat dibangun beberapa rumah pada tanah itu (Desa Raniate, 22 Januari 2017).

Dalam hal ini pada intinya pembahasan ini ingin mengetahui peran kepemimpinan kepala desa Raniate terhadap masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa. Indikator dari pada pembangunan infrastruktur desa yang akan dikaitkan kepada kepemimpinan kepala desa diantaranya adalah prasarana perhubungan yaitu jalan, baik jalan gang-gang maupun menuju kota atau kecamatan dan prasarana sosial/budaya misalnya gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, puskesmas/rumah sakit serta balai desa. Desa Raniate merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pangururan yang berada di daerah Kabupaten Samosir, di desa ini lebih dominan masyarakat yang bersuku batak toba, kondisinya desa ini sesuai dengan penelitian awal masih belum merata dalam pembangunan terlebih dalam pembangunan jalan-jalan di setiap jalur perumahan masyarakat kondisinya jalan-jalan masih beralaskan bebatuan sehingga pengendara akan merasa tidak nyaman jika melintasi jalan tersebut. Namun, kondisi jalan yang tidak merata pembangunannya karena desa yang cukup luas sehingga menurut pendapat sementara dana yang tidak memadai

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Kepemimpinan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Raniate, Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Kepala Desa b) Sekretaris, Aparatur Desa c) Kepala Lingkungan d) Organisasi Masyarakat e) Tokoh dan Warga masyarakat

Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan, Kepala Desa, dalam pembangunan infrastruktur di Desa Raniate, Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1991). Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan



dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan hal-hal pembangunan di Desa Rianiate, Kec. Pangururan, Kab. Samosir.

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan teknik analisis kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa. Selain itu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. "Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain (Suryadi. 2016:139).

Kepala Desa memotivasi warga dalam pembangunan desa kewajiban Kepala Desa yaitu Kepala Desa memberikan dorongan kepada warga desanya agar berperan aktif dalam membangun desa, misalnya yang sebelumnya fasilitas-fasilitas di desa belum ada dibuat menjadi ada seperti pembuatan gorong-gorong dan pelebaran parit/got agar air mudah mengalir, membuat jembatan, membuat sumur umum, perbaikan jalan, membuat balai pertemuan di setiap masing-masing RT serta membuat fasilitas lainnya yang dibangun secara bersama-sama atau bergotong royong. Dalam proses pelaksanaannya pun pemerintah desa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan terutama kelompok masyarakat setempat, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan penerima manfaat (masyarakat umum). Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa juga dapat menumbuhkan suatu kepedulian masyarakat terhadap kondisi desa tersebut karena didalamnya mereka lebih dibudidayakan arti kepemilikan dan arti kebersamaan untuk tetap menjaga kondisi dari pada desa tersebut.

Kepala desa secara langsung memberikan pengarahan dan pemahaman yang baik, yang dorongan itu bisa dilakukan melalui ketua RT secara langsung yang tidak lain mereka merupakan salah satu perpanjangan tangan dari kepala desa untuk nantinya bisa mengkoordinir masyarakat desa dengan baik. Kepala desa sudah memenuhi dan menjalankan perannya sebagai seorang kepala desa yang mampu memberi motivasi atau dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa cukup baik.

Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa. Oleh karena itu, perilaku kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, menggerakkan

anggotanya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa. Perilaku kepala desa selaku pemimpin yang harus melaksanakan fungsi kepemimpinan di desa, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin pemerintahan di desa dalam melayani kepentingan masyarakat. Hal ini perlu adanya tindak nyatanya dalam melibatkan masyarakat tersebut kepala desa dapat melakukan hal-hal yang sederhana.

Gaya kepemimpinan kepala desa Denok yang demokratis yaitu selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan aparat desa dan masyarakat desa untuk menciptakan keharmonisan dan juga agar tidak timbul kesenjangan yang terlampau jauh antara dirinya dengan seluruh warganya. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan kepala desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu kepala desa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa (Johan, 2015:876).

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. "Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain (Suryadi, 2016:139). Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut.

Pemimpin memiliki sifat kepribadian seperti vitalis dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk meneglotlah, memutuskan, menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, dan mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas.

Sudarwan Damim (Musriadi, 2012:39), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah individu atau kelompok yang bergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seni, kesanggupan, tehnik untuk membuat sekelompok orang-orang dalam organisasi mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya membuat mereka antusias atau bersemangat untuk mengikuti, bahkan ada yang sanggup berkorban.

Pemimpin diperlukan untuk mengendalikan dan mengkondisikan jalannya organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut tetap pada jalur yang benar. Salah satu peranan yang sangat penting dalam proses pengelolaan suatu organisasi adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan kerja yang ada dibawahnya demi terwujudnya kesatuan gerak dan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Integrasi demikian tidak akan terwujud jika seorang pimpinan tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Setiap pemimpin selalu menginginkan hasil kerja yang baik dari anggotanya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan sesuai dengan rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan merupakan pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun tidak tampak oleh bawahannya (Jacob, dkk, 2015).

Kepemimpinan merupakan unsur kunci dalam menentukan efektivitas maupun tingkat produktifitas suatu organisasi. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang - orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang - orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan - tujuan kelompok. Menurut K. Hemphill Kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.) Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemauan pribadi yang



sanggup mendorong atau mengajak orang lain unuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.

Bahkan untuk hal lebih jauh diantaranya pemimpin juga harus mampu untuk mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi yang dimaksud bukan sekedar mencari keuntungan dan kemewahan serta hal-hal yang bisa merugikan kepentingan kelompok. Efektifitas kepemimpinan dalam kaitannya dengan jumlah dan jenis kekuasaan yang dipunyai seorang pemimpin dan cara kekuasaannya tersebutdigunakan. Kekuasaan dilihat sebagai hal yang penting untuk mempengaruhi bawahan, kawan sejawat, atasan dan orang yang berada diluar organisasi seperti pelanggan dan pemasok.

Dari berbagai defenisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu. Dalam hal kepemimpinan bahwa sosok tersebut dianggap lebih memiliki suatu potensi yang tinggi. Potensi itu bukan sekedar cakap dalam mengeluarkan suatu masukan, saran, perintah namun ada potensi untuk mampu menarik simpati dan menjadi sosok pemimpin adalah tidak bersikap seolah-olah lebih hebat, dengan kata lain pemimpin mesti terlihat berkharismatik, memiliki wibawa. Sesuatu hal yang perlu dihindari dari sosok pemimpin yaitu bertindak otoriter yang berlebihan ada ketertarikan tersendiri menjadi sosok pemimpin itu adalah perlu bersahabat dengan anggota, perlu adanya sikap rendah hati dan ketegesan yang membangun. Namun perlu dipahami kepemimpinan itu perlu menerapkan suatu kesepakatan dan permuswaratan dalam suatu keputusan. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria. Kriteria apa saja tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan apakah itu sifat kepribadiannya, keterampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya atau kewenangan yang dimilikinya. Pemimpin berfikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas dan memiliki kekuasaan secara lebih luas.

Peranan seorang pemimpin pada dasarnya merupakan penjabaran serangkaian fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam bukan diluar situasi itu. Faktor penting dalam kepemimpinan, yakni dalam mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasan atau tingkah laku orang lain, ialah tujuan. Tujuan ini adalah pihak sipemimpin. Kepemimpinan untuk mengarahkan tingkah laku orang lain ke suatu tujuan tertentu (Ninik, 1988).

Menurut keterangan warga (Bp. Briono Sitanggung, 10 Januari 2018, 08.00 WIB) sejauh ini yang lebih terlibat dalam pembangunan desa adalah perangkat/pegawai desa, masyarakat sendiri hanya terlibat dalam kegiatan gotong royong yang selama ini dikerjakan hanya sekali setahun hanya karena kondisi tertentu saja misalkan ada pihak dinas yang ingin berkunjung kedesa itu, dan bahkan warga sendiri bentuk partisipasi hanya bersama-sama memperbaiki titik jalan tertentu yang dianggap tidak baik dan kegiatan seperti itu hanya diadakan jika kondisi mendesak.

Bahwa sesuai hasil pengamatan dari peneliti serta sesuai hasil wawancara dari informan yang dijadikan sumber informasi yang mendukung bahwa secara umum kepala desa Rianiate dapat dikatakan berpotensi dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala desa. Bahkan sesuai pengamatan peneliti selama melakukan penelitian serta sesuai kinerja yang sudah dilakukan oleh kepala desa sendiri dalam hal kepemimpinan yang berkaitan dengan motivator, fasilitator, transparan, disiplin, adil dan bertanggungjawab secara umum sudah dimiliki walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan bahkan kekurangmaksimalan namun sesuai kinerja yang telah dilakukan bahwa kepala desa sedang berusaha untuk memaksimalkan kepemimpinannya, selain itu juga dalam hal ini peneliti melalui pengamatan melihat bahwa ada beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa Rianiate adalah disiplin, toleransi, dan juga peduli terhadap kondisi masyarakat, dan sesuai keterangan masyarakat juga bahwa ia adalah sosok yang merakyat, dimana dalam tindakannya sebagai kepala desa adalah selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat dengan berkunjung kerumah-rumah masyarakat bahkan mendata setiap kondisi perumahan masyarakat yang tidak layak huni, sejauh

ini perkembangan yang terjadi selama kepemimpinan kepala desa Rianiate adalah sudah dibentuknya jalan-jalan penghubung dari dusun kedusun bahkan kondisi lingkungan masyarakat yang biasanya tidak ada jalan yang cukup baik untuk dilalui untuk keluar masuk desa saat ini sudah mendapat perhatian serius oleh kepala desa Rianiate saat ini.

Namun, yang masih sangat disayangkan bahwa perhatian kepala desa terhadap kondisi fisik desa masih dianggap kurang oleh peneliti hal ini dibuktikan sudah beberapa lama ia memimpin masih banyak jalan-jalan yang masih membutuhkan perhatian khusus terlebih kondisi jalan menuju kekantor desa Rianiate. Hal ini dapat diperhatikan melalui gambar dibawah ini.



Ada beberapa kinerja yang masih sangat disayangkan oleh masyarakat terhadap kondisi fisik (Infrastruktur desa Rianaite) adalah mestinya lokasi sekitar kantor desa mesti lebih diperhatikan dikarena kondisinya adalah sebagai ruang dan tempat keluar masuknya setiap masyarakat ataupun pejabat-pejabat yang hendak berkunjung kekantor desa, memang jika dinilai dari kepemimpinan kepala desa sebelumnya kepemimpinana kepala desa saat ini dapat dilihat dari perkembangan gedung sekolah yang bertambah (gedung Paud), pembangunan jalan-jalan (pembukaan, perekatan, perkerasan) kondisi jalan saat ini masih kondisi jalan yang sederhana dikarenakan untuk membentuk jalan berbentuk aspal masih dikatakan kekurangan dibidang dana sehingga pembentukan jalan tersebut semata-mata ada sarana masyarakat mempermudah perjalanan, perbaikan rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, serta jiwanya kepemimpinannya yang merakyat kepada masyarakat dimana sesuai keterangan masyarakat setempat bahwa kepala desa saat ini sering berkunjung kelokasi atau kerumah masyarakat, namun ketimpangan dalam kepemimpinan ini adalah masih lambatnya pembangunan.

Selain itu juga kinerja maupun kepemimpinan kepala desa pastinya menuai pro kontra dari masyarakat namun perlu diketahui kondisi pembangunan di desa kerap mengalami pertumbuhan yang lambat karena kondisi masyarakat yang masih kurang berpartisipasi, kondisi wilayah yang cukup luas serta pendanaan yang masih kurang memadai. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat masih dikatakan kurang memberi hati untuk terlibat didalam pembangunan infrastruktur desa dimana disini bukan berbicara kontribusi dana karena bukan urusan masyarakat dalam hal mengenai dana dalam pembangunan infrastruktur desa, artinya disini dikatakan bahwa adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam hal tenaga, pikiran ataupun inspirasi untuk mengembangan dan menjaga serta melindungi kondisi infrastruktur desa, artinya adalah dengan keterlibatan mereka berarti adanya rasa kepemilikan, merasa dilibatkan, dan kerena adanya saling membutuhkan, artinya perlu ditanamkan dalam masyarakat bahwa mereka mengerti hal itu karena mereka juga butuh hal tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Selanjutnya menurut Ahmadi desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri (Suwanti. 2016).

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian, dan moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan dan pinjaman. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan alat untuk membersihkan lingkungan seperti cangkul, dan bantuan ruangan untuk rapat. Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, dan keterampilan dalam membantu melaksanakan kegiatan di lingkungan masyarakat. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ide, saran, pertimbangan, nasehat, dukungan moril, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya, sehingga bisa mandiri selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparat pemerintah desa juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut (Wijiono, 2001).

Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dapat terlaksana dengan tujuan yang dibuat. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta partisipasi masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desanya dapat terealisasi. Kepala Desa menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa Kepala Desa mengarahkan atau menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desannya, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, memperbaiki balai desa, memperbaiki jembatan atau gorong-gorong, memperbaiki jalan, melakukan penanaman pohon jangka panjang, dan membantu sekolah-sekolah yang sedang melakukan perbaikan.

Menurut Nurman (2012), partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien baik dari aspek masukan, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi, dari segi aspek proses pelaksanaan, monitoring dan pengawasan dari segi aspek keluaran atau output.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat bukan sekedar dorongan semata dari pemimpin saja ada kalanya masyarakat sebagai penyalur aspirasi juga perlu bertindak untuk turut serta dalam pembangunan desa ini, perlu dipahami pula partisipasi masyarakat bukan hanya diperhatikan dari bentuk materi saja bahkan hal penting juga perlu dilakukan atau tindakan masyarakat adalah saluran ide ataupun argumen-argumen serta kerelaan hati, waktu dan tenaga.

Seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah bahwa prasarana-prasarana dalam pembangunan Infrastruktur desa yang dilaksanakan meliputi: 1) Peningkatan produksi antara lain: bendungan, saluran air dan listrik; 2) Prasarana perhubungan yaitu: jalan-jalan, bendungan, transportasi; 3) Prasarana sosial yaitu: gedung-gedung sosial, balai desa, rumah ibadah, maupun puskesmas.

Jadi jelaslah tugas utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah menumbuhkan rasa kepercayaan pada masyarakat serta mendorong untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, sebagaimana dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1995) sebagai berikut: 1) Keterlibatan aktif atau berpartisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan dan arah strategi kebijaksanaan pembangunan oleh pemerintah; 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi pengawasan sosial dan lain-lain; 3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat yang serasi pengawasan sosial dan lain-lain (Muriadi, 2012).

Dalam PP No. 27/2005 pembangunan berarti pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana-prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Hal ini menunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional pada umumnya.

Adisasmita (2006), mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, adalah peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/pokok pembangunan, dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Perencanaan dan implementasi program pembangunan dalam masyarakat itu adalah untuk mencapai peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan serta derajat kesehatan, peningkatan keswadayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi dapat dipahami dalam tiga hal yaitu: 1) Partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi; 2) Partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun; 3) Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam ini adalah masyarakat.

Untuk menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bahwa pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi bersamanya.

Menurut Megawati (2008) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikasi dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggungjawab dalam pembangunan.

Menurut Dwipayana (2003), partisipasi menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakkan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan

Menurut Tjokromidjojo partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: 1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; 2) Keterlibatan dalam memikul beban dan

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; 3) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab.

Pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil spritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dala susana preri kehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis, secara rinci Djiwandodo menjelaskan tujuan pembangunan desa meliputi: 1) Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan; 2) Tujuan sosial, kearah pemerintahan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan; 3) Tujuan demografis, kearah meningkatkan potensi sumber daya alam dan tingkat kepadatan penduduk perkapita; 4) Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat des secara maksimal dalam menungkgang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Nurman, 2012).

Pembanguna Infrastruktur desa mengandung pengertian lebih nyata. Pembangunan fisik yang dimaksud pembangunana sarana dan prasarana. Setiap pebangunan yang dilaksanakan meningkatkan nilai-nilai yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Menurut Limhanas pembangunan fisik maksudnya adalah pembangunan yang nampak secara nyata dan berwujud, serta dapat dilihat.

Adapun indikator-indikator yang dapat diperjelas tentang pembanguna fisik adalah 1) Prasarana perhubungan, yaitu Yang dimaksud prasarana perhubungan adalah jalan, baik jalan di gang-gang, menuju ibukota serta kecamatan; 2) Prasarana produksi/ekonomi yaitu Yang dimaksud produksi/ekonomi adalah hal yang menyangkut dengan kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa prasarana. Yang dapat dikatakan kategori prasarana yaitu, pabrik, irigasi, minimarket, sawah, ladang/kebun dan sebagainya; 3) Prasarana sosial dan Budaya, adalah setiap pembangunan yang dalam pemakaiannya bersifat umum dan bersama. Yang termauk sosial budaya misalnya gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, rumah sakit, balai pertemuan (Johan, 2015).

Terkait masalah pembangunan infrastruktur desa Rianiate dalam bentuk keterlibatan masyarakat, adanya ketelibatan masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga ataupun aspirasi secara pikiran alasan lainnya juga masyarakat kurang memberi hati untuk terlibat karena adanya anggapan bahwa itu semua bukan urusan masyarakat. Sehingga kepala desa sendiri tetap melibatkan masyarakat dengan memberi upah kepada masyarakat sebagai pekerja yang diberi upah, hal ini menjadi hal wajar dirasa karena sebagian masyarakat sangat disibukkan untuk pertaniannya, bahkan pengamatan peneliti juga bahwa sebagian besar masyarakat masih sibuk untuk mementingkan pekerjaan masing-masing.

Perlu dibahas lebih dalam mengenai kaitan kondisi kepemimpinan kepala desa Rianiate dengan pemabangunan infrastruktur desa Rianiate, selain memiliki potensi yang penting desa Rianiate juga masih menyimpan berbagai masalah yang perlu segera ditangani pemerintah, agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadikannya sebagai kesenjangan pembangunan.

Dalam penjarangan masalah yang dilakukan disetiap dusun antara aparat pemerintah desa bersama fasilitator PNPM Mandiri dalam Proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) didapati beberapa masalah yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh warga, sebagian besar hanya memiliki kemampuan bertani secara tradisional yang dipelajari secara turun-temurun; 2) Belum adanya sarana air bersih yang layak; 3) Persoalan kepemilikan tanah yang kurang jelas, karena sebagian besar tanah dimiliki

bersama satu keturunan atau satu klan marga; 4) Prasarana jalan desa yang belum baik, sebagian besar jala tanah yang labil dan rawan longsor; 5) Belum adanya jalan-jalan usaha tani yang layak dan bisa memperlancar akses angkutan terutama apabila musim hujan; 6) Hewan ternak warga belum diusahakan dengan baik, sebagian masih liar dan mengganggu pertanian warga; 7) Rawa-rawa dan kolam darat belum dikelola menjadi usaha yang produktif; 8) Bantaran sungai rawan banjir sehingga berpotensi merusak areal pertanian; 9) Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi criteria sanitasi yang layak belum ada; 10) Belum adanya keterampilan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi UKM sehingga belum bisa menambah pendapatan masyarakat.

Banyak terjadi ketimpangan yang terjadi sebenarnya adalah karena kondisi dana yang masih kurang memadai untuk desa yang cukup luas dan perlu banyak pembenahan karena pemimpin-pemimpin sebelumnya masih kurang memperhatikan kondisi infrastruktur desa apalagi bidang membuat minat partisipasi masyarakat masih sangat minim, sehingga kepala desa yang menjabat saat ini masih dikatakan tahap proses pembenahan dan perbaikan secara maksimal. Ketimpangan yang terjadi, misalnya peralatan pertanian masih tradisional dan karakter suku batak yang cenderung tidak suka diatur. Hal ini diistilahkan "*sude boru dohot anak ni raja*", sehingga pada hakikatnya sangat berpengaruh dengan pemerintahan desa, ditinjau adat di Rianiate ini masih menerapkan sistem kekeluargaan dan partuturan sehingga untuk menerapkan kebijakan dan peraturan masih cukup sulit untuk dilaksanakan.

SIMPULAN

Secara umum dapat dikatakan kondisi pembangunan desa Rianiate sudah cukup mengalami perkembangan dan kemajuan, hal ini terbukti ada dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan yang selama ini di nantikan oleh masyarakat sudah terbangun serta adanya bangunan-bangunan sekolah yang didirikan dan lain sebagainya hal ini juga dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Kepala desa merupakan pemimpin yang disegani oleh masyarakat dan sangat memiliki pengaruh yang kuat didesa. Kepala desa dapat menjadi pendorong, pemberi motivasi, pengayom, pemberi bimbingan khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Tetapi peran kepala desa Rianiate dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa masyarakat kurang memberikan partisipasi baik sumbangan pikiran, materi dan uang maupun tenaga.

Bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap proses pembangunan yang ditunjukkan melalui partisipasi secara penuh oleh masyarakat. Tetapi masyarakat masih kurang peduli dengan lingkungan bahkan masyarakat malas untuk berpartisipasi dalam pembangunan didesa, masyarakat masih lebih peduli urusan pribadi dan menganggap bahwa segala pembangunan itu urusan pemerintah, dan masyarakat masih berharap ketika terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan mesti memperoleh upah dalam hal ini segi kepeulian masyarakat bahkan gotong royong sangat kurang, mereka mengkaui memang ada kegiatan gotong royong yang dilaksanakan namun, kenyataannya masih sedikit dampak atau hasil gotong-royong yang dikerjakan.

Komunikasi antara aparat dan masyarakat harus terjalin dengan baik sehingga timbul dorongan untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di desa Rianiate dalam hal ini sudah melakukan penghimbau kepada masyarakat kepada beberapa anggota masyarakat diberi kebebasan untuk mewakili permusyawaratan melalui kepala dusun masing-masing dusun. Kondisi desa yang masih menerapkan sistem tanah marga dan adat masih kental sehingga kesan memaksa ataupun kesan ketegasan yang akan dilakukan oleh kepala desa dan aparat di Desa ini sulit diterapkan, dan dalam hal ini pemahaman masyarakat terhadap perannya sebagai warga desa untuk kemajuan desa masih lemah.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asisamita, R. (2013). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alam, S.A. (2016). Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9. Nomor 2*.
- Arini, N.W. (2014). Kepemimpinan Lokal Dan Kehidupan Sosial Politik Perempuan Di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 3. Nomor 2 ISSN 2303-2898*.
- Dwipayana, A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 3. Nomor 2*.
- Husni, M. (2005). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Payak Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.
- Johan, S. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintah, Volume 3. No. 2*.
- Kartono, K. (2002). *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia Pustaka, Jakarta
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1. Nomor 2*.
- Melis, dkk. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi, Volume 1 No. 1, ISSN 2503-1937*.
- Mering, F. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak. *Volume 3. Nomor 4*.
- Muryusna. (2014). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Volume 1. Nomor 2, ISSN 2356-3885*.
- Musriadi. (2012). Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanggarong Seberang. *Jurnal Ilmu sosial, Volume.1 No. 1*.
- Nurman. (2012). *Strategi Pembanguna Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prabowo, H. (2012). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 10. Nomor, ISSN 0854-2031*.
- Prasadjaja, B. (1986). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jacob, R. dkk. (2015). Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Pemerintahan, Volume 3 no. 3, ISSN 2303-1*.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardi. (2015). Pemahaman Manajemen Pedesaan Pada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Jurnal Administrasi Publik Volume 12. Nomor 01, ISSN 2355-7249 Hal. 139-14*
- Suryadi, dkk. (2016) Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Politik, Volume 3. Nomor 1, ISSN 139-146*.
- Suwanti. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Timur Bengkel Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal ADM, Volume 4. Nomor 1*.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Taufiq, A. & Wijono, H. (2010). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Fisik Di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbond. *Jurnal politik, Volume 2. Nomor 2*.
- Welly. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Kalamok Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 4. Nomor 1, ISSN 2337-8670*.
- Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Widiyanti, N. (1998). *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Bina Aksara.